



KETERLIBATAN AMERIKA SERIKAT DI BAWAH PEMERINTAHAN BARACK OBAMA DALAM MEMBANTU UGANDA MEMERANGI *LORD'S RESISTANCE ARMY* 2009-2017

Nuharani Savitri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1296

Website: <http://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Lord's Resistance Army is a terrorist group founded in 1987 which was formed due to Acholi community's dissatisfaction with Ugandan government. Various policies to deal with the LRA had been implemented, including carrying out joint military operations and doing negotiation efforts which failed to reach an agreement. United States has made various efforts to help Ugandan government to fight the LRA in the region, in the form of military and non-military assistance. In this study, the author uses the perspective of neoclassical realism and national interest to explain the reason behind the involvement of the United States in counter-LRA activities in the region with qualitative method which is carried out by collecting and analyzing data through literature and documentation studies. The result of this study indicates that the involvement of United States in helping Uganda is determined by structural and domestic factors, namely; the increasing Chinese influence in the region, which leads U.S to make Uganda as its security partner in Africa, oil competition in the region, the perceived role in the National Security Strategy document which considered U.S as the leading role and also Obama's view regarding the importance of seeking best partners in Africa to U.S national interests.

Keywords: *Lord's Resistance Army, U.S Special Forces, Neoclassical Realism, Perceived Threat, Domestic Sphere, Perceived Roles.*

PENDAHULUAN

Salah satu kelompok ekstrimisme yang terkenal di benua Afrika adalah *Lord's Resistance Army* (LRA) atau Tentara Perlawanan Tuhan yang dipimpin oleh Joseph Kony. Kelompok ini telah melakukan banyak kejahatan kemanusiaan, termasuk diantaranya pembunuhan secara massal, mutilasi, dan perekrutan tentara anak (Allen, 2010). LRA terbentuk karena timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat suku Acholi terhadap Presiden Museveni sebagai pemimpin *National Resistance Movement* (NRM) yang telah menjabat sejak 1986 di Uganda menggantikan Presiden Okello yang berasal dari suku Acholi (Van Acker, 2004). Banyak kekacauan yang dilakukan oleh LRA, tidak hanya berada di dalam kawasan Uganda itu sendiri namun juga bergerak ke utara *Democratic Republic of Congo* (DRC), *Central African Republic* (CAR), dan Sudan Selatan (Ploch, 2012). Protes dan upaya memerangi LRA datang dari lingkup internal dan eksternal Uganda. Pemerintah Uganda telah berusaha menghentikan kelompok teroris ini, namun usaha yang dilakukan berjalan berlarut-larut dan LRA tetap dapat beroperasi hingga puluhan tahun lamanya. Pemerintah Uganda tidak dapat menundukkan kelompok ekstrimis ini, sehingga bantuan dari luar negeri sangat dibutuhkan.

Upaya memerangi LRA juga datang dari Amerika Serikat, terutama setelah Barack Obama menjabat sebagai presiden AS sejak tahun 2009 menggantikan George W. Bush. Amerika Serikat telah turut memerangi LRA sejak tahun 2001, dan intensitas bantuan semakin bertambah sejak Obama menjabat. Amerika Serikat ikut terlibat dalam upaya mencegah kekerasan yang dilakukan oleh LRA dan turut membantu pemerintah Uganda dalam upaya menangkap pemimpin LRA serta melindungi warga sipil dari serangan pemberontak. AS juga mengupayakan pemulihan dan membantu proses rekonsiliasi di Uganda bagian utara, serta melakukan upaya pencegahan konflik di masa yang akan datang (warondoctors.org, 2010). Salah satu bentuk partisipasi Amerika Serikat yang mendapat sorotan publik adalah disahkannya *Lord's Resistance Army Disarmament and Northern Uganda Recovery Act 2009*.

Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk dibahas karena sebenarnya LRA sendiri tidak merugikan Amerika Serikat secara langsung dan tidak memberikan ancaman apapun terhadap negara adidaya tersebut. Terlebih lagi, LRA bukanlah sebuah kelompok ekstrimis Islam dan semenjak tahun 2008 aktivitas LRA cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat masih bermarkas di Uganda bagian utara. Berikutnya, hal yang menarik yaitu latar belakang lahirnya LRA itu sendiri. LRA dibentuk oleh Joseph Kony dengan tujuan untuk menjatuhkan rezim Presiden Museveni yang sudah memerintah di Uganda selama 28 tahun. Adanya fakta ini, menandakan bahwa tidak terjadi perubahan kepemimpinan secara berkala di Uganda sebagai implementasi pemerintahan demokratis, padahal nilai-nilai pemerintahan yang demokratis sangatlah dijunjung tinggi oleh AS dan menjadi prinsip dalam politik luar negerinya. Selain itu, berdasarkan Palang Merah Internasional, rezim Presiden Museveni bertanggung jawab atas meninggalnya 1,5 juta etnis Acholi dan setidaknya 300.000 ribu orang, ketika mengambil alih kepemimpinan tahun 1986 (Ploch, 2012). Melihat fakta-fakta tersebut, Amerika Serikat justru berkomitmen untuk membantu pemerintah Uganda dalam memerangi LRA di kawasan dengan memberikan bantuan militer dan non-militer. Peran Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Uganda tidak begitu signifikan di masa pemerintahan George W. Bush, namun hal tersebut berubah saat Barack Obama menjabat sebagai presiden di tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu Uganda memerangi *Lord's Resistance Army* di kawasan.

Dengan menggunakan teori realisme neoklasik dan konsep kepentingan nasional, keterlibatan AS dalam membantu Uganda akan dijelaskan dengan melihat struktur internasional dan pandangan elit politik domestik AS yang mana keduanya saling mempengaruhi. Realisme neoklasik berangkat dari dua pendekatan realis dasar, yaitu; 1) neorealisme, dimana teori ini menekankan pada pentingnya struktur sistem negara internasional dan kekuatan relatif negara; dan 2) realisme klasik, dimana teori ini menekankan pentingnya kepemimpinan dalam kebijakan luar negeri. Teori ini berusaha memperkenalkan suatu elemen yang diabaikan oleh teori realis lain, yaitu menganalisis karakteristik domestik negara yang mana dapat digunakan untuk menganalisa apa faktor-faktor pendorong keterlibatan AS di kawasan Afrika bagian tengah dalam membantu pemerintah Uganda memerangi *Lord's Resistance Army*.

Argumen utama dalam penelitian ini menyatakan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam membantu pemerintah Uganda memerangi *Lord's Resistance Army* dilatarbelakangi oleh adanya perubahan dinamika politik internasional yang membuat Amerika Serikat harus mencari aliansi dan adanya peningkatan pengaruh Tiongkok di benua Afrika. AS tetap ingin menjadikan Uganda sebagai mitra keamanan dalam usahanya membendung pengaruh Tiongkok di kawasan. Hal ini didorong oleh adanya persepsi peran AS sebagai negara adidaya dan pandangan Obama terhadap peran AS sebagai *leading role* di dalam kancah internasional.

PEMBAHASAN

Faktor Struktural Keterlibatan Amerika Serikat dalam Membantu Uganda Mengatasi LRA

Unsur neorealisme dalam teori realisme neoklasik menekankan tentang adanya struktur internasional (Forsudd, 2009) dan konsep perimbangan kekuasaan sehingga pembentukan aliansi perlu dilakukan demi membendung kekuatan non-aliansi. White (2010) mengungkapkan bahwa sebelumnya benua Afrika bukan menjadi prioritas utama kebijakan Amerika Serikat di lingkup internasional dan administrasi Obama berusaha mengubah hal ini. Posisi Afrika semakin penting bagi AS karena meningkatnya ancaman di beberapa negara di kawasan Afrika. Pada saat George W. Bush menjabat sebagai presiden AS, AS lebih banyak memfokuskan kebijakan luar negerinya pada Irak, Afghanistan, Yaman, dan negara-negara di Timur Tengah lainnya. Namun pada tahun 2000an, Tiongkok mulai menaruh perhatiannya ke wilayah Afrika, baik dari segi politik maupun ekonomi. Tiongkok diketahui turut terlibat dalam konflik internal di Sudan dan Sudan Selatan yang notabene menjadi negara tetangga Uganda, serta melakukan ekspansi sumber daya alam ke wilayah Afrika termasuk Uganda itu sendiri. Beberapa ahli yakin bahwa kehadiran AS di Afrika dimotivasi oleh kepentingan yang lebih spesifik: Tiongkok dan minyak. Sejak tahun 2000an, dengan pengaruh Soviet yang hilang di Afrika setelah berdisintegrasi tahun 1990an dan kehadiran Perancis yang semakin berkurang, Tiongkok hadir di benua Afrika dengan memberikan bantuan dana kepada negara-negara di benua tersebut karena Tiongkok memerlukan akses sumber daya alam (Boehm, 2011). French (2014) menganggap bahwa Tiongkok merasa Afrika telah dikesampingkan oleh Barat setelah Perang Dingin usai. Tiongkok melihat benua tersebut sebagai tempat pembuktian yang sempurna bagi beberapa perusahaan Tiongkok untuk berkiprah dalam bisnis internasional.

Persaingan perimbangan kekuasaan terlihat dalam keterlibatan kedua negara di Sudan, Sudan Selatan, dan Uganda. Situasi kompleks di Sudan adalah salah satu hal yang menonjol antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam memandang Afrika. Fakta bahwa Tiongkok telah menjalin hubungan dan melakukan kerjasama perdagangan dengan Sudan membuat upaya pengisolasian Sudan oleh AS dan komunitas internasional menjadi kurang efektif (Shinn, 2009). Tiongkok telah menggunakan hak vetonya di PBB untuk melindungi Sudan di masa lalu. Berbeda dengan Sudan, Sudan Selatan merupakan negara strategis dan telah mendapatkan bantuan luar negeri dari AS dengan jumlah yang cukup besar karena Tiongkok memiliki pengaruh yang besar di Sudan Selatan. Dalam struktur internasional, negara adidaya seperti AS cenderung akan melakukan perimbangan kekuatan di wilayah yang tingkat pengaruh negara non-aliansi tinggi. Tiongkok terlibat dalam membantu proses penyelesaian konflik Darfur di Sudan bagian selatan (yang sekarang menjadi Sudan Selatan), mengirimkan 700 pasukan militer yang tergabung dalam misi perdamaian PBB, *United Nations Mission in the Republic of South Sudan* (UNMISS) (Matthews, 2013).

Keterlibatan Amerika Serikat dalam proses kemerdekaan Sudan Selatan juga merupakan upaya AS untuk menekankan pengaruhnya di kawasan. Diketahui bahwa Tiongkok merupakan aliansi Sudan, dan AS serta Tiongkok sama-sama terlibat dalam penyelesaian konflik di Darfur, namun Tiongkok memberikan hak vetonya untuk melindungi Sudan beberapa tahun silam, sedangkan AS memiliki sejarah yang tidak baik dengan Sudan karena pihaknya diduga menyembuyikan Osama bin Laden di wilayahnya dan AS sangat mengecam hal tersebut. Dengan terlibat dalam proses merdekanya Sudan Selatan, terlihat disini bahwa AS menghendaki berpisahnya Sudan Selatan dari Sudan dengan alasan mendukung penegakan demokrasi di kawasan (Blanchard, 2013). Pada kenyataannya, upaya tersebut merupakan upaya AS untuk mendorong pemisahan Sudan Selatan dari Sudan, agar dapat lebih banyak berinvestasi di dalam sektor minyak di Sudan Selatan. Sudan Selatan memiliki sumber daya alam yang besar khususnya minyak. Di dalam perjanjian

Comprehensive Peace Agreement (CPA), sebuah perjanjian penyelesaian konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, pemerintah Sudan Selatan akan mendapatkan 50% pemasukan dari hasil produksi minyak (Brookes, 2007). Setelah Sudan Selatan resmi merdeka dari Sudan, kedua negara baik AS dan Tiongkok sama-sama berusaha meningkatkan investasinya di Sudan Selatan karena hampir seluruh ladang minyak Sudan dulunya berada di Sudan Selatan (www.foreignaffairs.com, 2016).

Perubahan dinamika dalam penyelesaian politik di Uganda, terutama sejak pertengahan 2000an, telah diikuti oleh perubahan penting dalam konteks geopolitik. Hal ini disebabkan oleh ditemukannya penemuan tingkat minyak komersial di wilayah Uganda dan masuknya pemain baru seperti Tiongkok (Hickey dan Izama, 2017). Perkiraan kapasitas cadangan minyak bumi Uganda saat ini adalah 6,5 miliar barel, dimana 1,4 miliar barelnya dapat diperbaharui (PEPD, 2014). Aktifnya Amerika Serikat di kawasan merupakan upaya AS untuk dapat mengimbangi pengaruh Tiongkok baik dalam segi politik maupun ekonomi. Kedua sektor ini berpengaruh satu sama lain, karena keterlibatan AS di sektor politik merupakan upaya untuk memperluas keuntungan ekonomi yang didapat dari negara-negara penerima bantuan luar negeri. Secara geopolitik, AS mendapatkan keuntungan karena Sudan Selatan tidak lagi akan bergantung pada Sudan dalam pendistribusian minyak, yang notabene menjadi aliansi Tiongkok. Pemberian bantuan AS kepada Uganda juga menjadi upaya AS untuk membangun hubungan multilateralisme sebagai komitmen dalam menjadikan Uganda sebagai aliansi di kawasan, dan sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor minyak di Uganda.

Konflik LRA yang menjadi isu keamanan di kawasan, terutama setelah peristiwa 9/11, menjadikan pemerintah Uganda sebagai sekutu kunci Amerika Serikat di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mencirikan Uganda sebagai “mitra kunci bagi Amerika Serikat di kawasan dan kekuatan penting dalam stabilitas regional”, dan *Ugandan People Defence Forces* (UPDF) secara luas dipandang sebagai salah satu kekuatan militer paling efektif di kawasan itu (Dagne, 2009). Realisme neoklasik melihat bantuan luar negeri sebagai salah satu wujud multilateralisme yang dilakukan oleh suatu negara sebagai aktor rasional yang ingin menyebarkan pengaruhnya dan mencapai kepentingan nasional namun masih tetap dalam koridor diplomatik. Kunci strategi global pemerintahan Obama di era pasca konflik di Irak adalah pergeseran dari “boots on the ground” menjadi “pembangunan aliansi di kawasan”. Presiden Uganda, Yoweri Museveni, telah menjadi penerima bantuan militer Amerika Serikat dan dukungan diplomatik yang terbilang signifikan dari pemerintah AS, sebagai bentuk *war on terror*-nya sendiri melawan LRA. Dengan gantinya, pemerintah Uganda membantu kelompok militer SPLA milik Sudan Selatan, sebagai aktor garis depan dalam *war on terror* AS melawan pemerintah Sudan (Branch, 2005). SPLA yang sebelumnya melakukan gerakan bernama *Sudan People Liberation Movement* (SPLM), berusaha berpisah dari Sudan sejak bertahun-tahun lamanya. Pada akhirnya, Sudan Selatan mendapat kedaulatannya di tahun 2011. Sejak periode 1994 sampai dengan 2005, Sudan menjadi aktor dibalik ketahanan LRA karena pemerintah Sudan telah membantu LRA dalam melatih kemampuan kombatanannya dan menyediakan tempat bersembunyi bagi Kony dan kroninya. Sudan menyediakan bantuan logistik dan tempat berlindung (Dagne, 2009). Sebagai gantinya, LRA harus membantu Sudan dalam melawan SPLM dan berupaya agar Sudan Selatan tetap menjadi bagian Sudan.

Peran Uganda sebagai mitra keamanan AS di Afrika juga terlihat dari keterlibatan Uganda di Somalia dalam rangka membantu pemerintah Somalia melawan kelompok teroris Al-Shabaab. Uganda mengerahkan sekitar 2.700 pasukan penjaga perdamaian ke Somalia. Pada Juni 2009, diperkirakan ada 5.000 pasukan penjaga perdamaian Uganda di Somalia. Selain itu, Uganda juga turut membantu AS dalam misi kemanusiaan di Sudan Selatan. Dukungan paling menonjol yang diperlihatkan Uganda kepada AS terjadi ketika tiga CV-22

Osprey dipaksa untuk beralih ke Entebbe setelah ditembaki, melukai empat personel di dalamnya. Pesawat militer tersebut berusaha mendarat di Bor, Sudan Selatan, untuk mengevakuasi pasukan AS (www.africom.mil, 2014). Sebelumnya Angkatan Udara AS juga pernah menerbangkan dua pesawat *C-17 Globemaster III* dari Uganda untuk memberikan dukungan pengangkutan udara ke batalion Rwanda yang berada di Republik Afrika Tengah dalam misi kemanusiaan setelah terjadinya konflik di negara tersebut. Untuk alasan ini lah mengapa Amerika Serikat tetap memberikan bantuan kepada Uganda meskipun negara ini cenderung otoritarian dan tidak menganut sistem demokrasi.

Faktor Domestik Keterlibatan Amerika Serikat dalam Membantu Uganda Mengatasi LRA

Anarki bukanlah faktor independen yang membentuk perilaku negara di luar negeri karena sesungguhnya para pemimpin dan elit politik lah yang melakukan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan persepsi mereka tentang kekuatan negara merupakan hal yang penting (Jamshidi dan Noori, 2017). Hemmer (2011) mengatakan bahwa terdapat tiga tanggung jawab Amerika Serikat yang tercantum dalam *U.S Constitution for the American government*, yaitu; 1) melakukan *common defense* atau pertahanan untuk sesama; 2) meningkatkan kesejahteraan umum; dan 3) menjamin rasa dan hak kebebasan. Ketiga poin ini tampaknya tercantum dalam tiap dokumen strategi keamanan pemerintah AS yang disebut *National Security Strategy* (NSS). Di dalam NSS 2002, George W. Bush memasukkan perdamaian, kemakmuran, dan kebebasan sebagai tujuan mendasar AS. Di dalam NSS milik pemerintahan Obama tahun 2010 dan 2015, ketiganya juga turut tercantum, tetapi Obama menambahkan tujuan keempat; tatanan internasional yang dikembangkan oleh kepemimpinan AS yang mempromosikan perdamaian, keamanan, dan peluang melalui kerjasama yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan global” (NSS, 2010). Obama terlihat jelas sangat menekankan promosi perdamaian dan keamanan yang diwujudkan dalam kerjasama demi mencapai tujuan bersama. LRA telah mengusik keamanan regional di kawasan Afrika bagian tengah sejak 1986 dan menjadi hal yang semestinya bagi AS untuk turut membantu mencapai stabilitas di kawasan sebagai *leading role*. Peran AS sebagai *leading role* mengharuskan AS untuk senantiasa berusaha melakukan upaya-upaya demi mewujudkan keamanan, kemakmuran, menyebarkan nilai-nilai AS, dan mewujudkan tatanan global yang berkelanjutan (U.S Department of State, 2010). AS akan melakukan upaya melalui diplomasi dan norma internasional sebagai wujud AS dalam mencapai perdamaian. NSS 2010 juga menekankan tentang perlunya memberikan bantuan baik ekonomi atau militer demi mempromosikan nilai-nilai AS, mencapai kepentingan, dan memperkuat legitimasi AS. Kutipan tersebut juga membenarkan pernyataan bahwa pelestarian nilai-nilai AS menjadi justifikasi penggunaan kekuatan, aksi militer, dan aksi unilateral di lingkup global. Davidson (2015) menyebutkan bahwa tiga kata “*lead*” atau memimpin, “*leadership*” atau “kepemimpinan” dan “*leader*” atau “pemimpin” telah muncul 94 kali dalam dokumen strategi administrasi Obama tahun 2015. Gagasan tentang peran utama AS di dunia telah disebutkan berulang kali dalam semua dokumen NSS berdasarkan persepsi bahwa AS berada pada *outstanding position* dibandingkan dengan negara lain sejak Perang Dingin berakhir (Jamshidi dan Noori, 2017).

Terpilihnya Barack Obama dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat ke-44 menandai titik balik kebijakan luar negeri AS. Dalam kampanyenya, Obama menyatakan bahwa administrasinya kelak akan meningkatkan hubungan AS dengan negara-negara lain, khususnya di benua Afrika, yang tentunya bertentangan dengan unilateralisme yang menjadi ciri kebijakan luar negeri George W. Bush (White, 2010). Pentingnya benua Afrika bagi AS meningkat karena adanya faktor ancaman terhadap keamanan AS di wilayah tertentu di Afrika. Sebelumnya, pemerintahan Bush berfokus pada negara-negara di Timur Tengah dan sebagian kecil negara di kawasan Afrika seperti Sudan, Liberia, dan Kongo. Di beberapa

kesempatan dalam kampanyenya, Obama berbicara mengenai keinginannya membantu negara-negara Afrika untuk berkembang secara ekonomi dan meningkatkan keamanan di kawasan, serta menjadikan negara-negara Afrika sebagai *potential valuable international partners* (White, 2010). Bahkan, pada tahun 2010, Obama sempat mengatakan di dalam pidatonya di Markas Besar PBB di New York yang mana ia menekankan peran AS sebagai *global leader* yang akan terus melakukan multilateralisme dengan negara-negara yang dianggapnya dapat memberikan keuntungan bagi AS (UN Dispatch, 2010). Stephen G. Rademaker, seorang mantan pejabat di pemerintahan George W. Bush mengatakan bahwa bagi ukuran seorang yang berasal dari sayap liberal Partai Demokrat, sungguh hal yang luar biasa betapa seriusnya Obama dalam mengejar *great power strategy*. Isu-isu mengenai hak asasi manusia dan promosi demokrasi tidak tampak signifikan dalam kebijakan luar negerinya. Terdapat kontradiksi antara pemberian bantuan ‘kemanusiaan’ AS yang diberikan dalam rangka penegakan nilai demokrasi dan hak asasi manusia di negara penerima donor karena buktinya tidak terjadi perubahan demokrasi di pemerintahan Uganda dan Obama tidak melakukan apapun kepada Museveni yang telah banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia di negaranya.

Salah satu kebijakan militer Amerika Serikat yang terbilang cukup kontroversial terhadap Afrika adalah pembentukan *U.S-Africa Command* (Africom), yang diumumkan di bawah Pemerintahan Bush pada Februari 2007. Africom membantu AS mengoordinasikan operasinya dengan lebih baik di kawasan dan berkoordinasi dengan mitra AS lainnya serta negara-negara asing yang terlibat di Afrika seperti Inggris dan Prancis. Africom dalam hal ini membantah pihaknya memiliki tujuan untuk membangun pangkalan pasukan besar atau “take a leading role in African security matters” (Africom, n.d). Salah satu kampanye terbesar anti-Africom yang bernama *Resist Africom*, mengklaim bahwa misi sebenarnya dari komando AS itu adalah untuk melawan terorisme di Afrika, mengamankan sumber daya minyak di Afrika, dan membendung peningkatan investasi dan keterlibatan Tiongkok di benua itu (Resist Africom, n.d). Terlepas dari kritik dari didirikannya Africom, Pemerintahan Obama tetap membela Africom dan meningkatkan serta memperluas pendanaannya. Anggaran yang diusulkan Administrasi Obama untuk TA2010 mencakup sekitar US \$300 juta untuk *Africom dan Operation Enduring Freedom-Trans-Sahara Counter-Terrorism Partnership* (TSCTP) (White, 2010). Hal ini merupakan hal yang aneh karena Uganda sendiri bukanlah negara demokratis dan AS tidak berusaha mengaplikasikan nilai-nilai demokratisnya pada pemerintahan Uganda.

KESIMPULAN

Keterlibatan Amerika Serikat dalam membangun hubungan kerjasama multilateral dengan Uganda dalam melakukan aksi kontra-LRA di kawasan dipandang melalui kaca mata realisme neoklasik sebagai respon AS sebagai negara berdaulat yang menentukan perilaku negaranya berdasarkan faktor-faktor struktural dan domestik AS. Pasca Perang Dingin, kompetisi negara adidaya telah mendorong Amerika Serikat untuk menciptakan sekutu dan proksi di Afrika sebagai cara untuk memperluas jangkauan global mereka. Kompetisi ini diwujudkan dalam perluasan jaringan aliansi, pendanaan militer, perang proksi, operasi militer, dan lain sebagainya, serta mendorong memperluas pengaruh AS melalui lembaga keuangan global seperti World Bank dan IMF. Hal ini menjelaskan alasan di balik kesediaan negara-negara aliansi AS untuk menerima bantuan luar negeri AS dan turut mengerahkan pasukan lokal atas nama mereka. Persaingan intensif dengan Tiongkok telah memicu tingkat keterlibatan militer AS di Afrika dalam rangka perebutan sumber daya. Sumber daya yang signifikan bagi keduanya adalah minyak, di mana Afrika memainkan peran sebagai pemasok minyak bagi AS dan Tiongkok. Keterlibatan AS dalam membantu Uganda juga menjadi salah satu perwujudan komitmen AS dalam menjadikan Uganda sebagai sekutu di Afrika. Uganda

menjadi aktor yang mendukung pergerakan militer AS di kawasan, seperti contohnya pada Sudan, Sudan Selatan, Somalia, Kongo, dan Rwanda. Selain itu, keterlibatan AS di kawasan juga dipengaruhi oleh persepsi peran AS sebagai *leading role* yang tercantum dalam dokumen *National Security Strategic* AS yang mengatakan bahwa AS berada dalam *outstanding position* dimana AS perlu melakukan upaya-upaya untuk menjaga keamanan di lingkup internasional. Obama dalam hal ini juga berpandangan bahwa AS sebagai *global leader* akan terus mencari negara-negara mana yang cocok menjadi mitra terbaik AS yang sekiranya pantas untuk mendapatkan bantuan luar negeri dari AS. Terlihat jelas bahwa AS memberikan bantuan pada negara-negara aliansi yang dapat membantu AS mencapai kepentingan nasionalnya, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

REFERENSI

- Allen, T dan Vlassenroot, K 2010, *The Lord's Resistance Army: myth and reality*, Zed Books.
- Blanchard, LP 2013. "The Crisis in South Sudan" dalam *Library of Congress*, Congressional Research Service. 2013 <<https://www.markswatson.com/south%20sudan%20-%20CRS.pdf>>, diakses tanggal 27 Maret 2019.
- Boehm, S 2015, "The politics of American aid and conflict in Northern Uganda" dalam *The Politics of American Aid and Conflict in Northern Uganda*, p.3.
- Branch, A 2005. *Neither peace nor justice: Political violence and the peasantry in northern Uganda, 1986-1998*, 2005 <<http://asq.africa.ufl.edu/files/v8i2.pdf>>, diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Brookes, P 2007. "Into Africa: China's Grab for Influence and Oil" dalam *Heritage Lectures, 1006*, pp.1-5. 2007 <http://s3.amazonaws.com/thf_media/2007/pdf/hl1006.pdf>, diakses tanggal 27 Maret 2019.
- Dagne, T 2009, *Uganda: Current Conditions and the Crisis in North Uganda*, DIANE Publishing.
- Davidson, J 2015, "Obama's last national security strategy" dalam *Foreign Affairs*.
- French, HW 2014, *China's second continent: How a million migrants are building a new empire in Africa*, Vintage.
- Forsudd, CM 2009, *The Motives of Aid Donors: A comparative study of the aid allocation of Denmark, Norway and Sweden*.
- Hemmer, C 2011, "Continuity and Change in the Obama Administration's National Security Strategy" dalam *Comparative Strategy*, 30(3), pp.268-277.
- Hickey, S dan Izama, A 2017. "The politics of governing oil in Uganda: Going against the grain?" dalam *African Affairs, Volume 116, Issue 463*. 1 April 2017 <<https://academic.oup.com/afraf/article/116/463/163/2605669?searchresult=1#64513000>>, diakses tanggal 2 Februari 2019.
- Jamshidi, M dan Noori, F 2017. "The United States National Security Strategy under Bush and Obama: Continuity and Change" dalam *World Sociopolitical Studies. 1. 175-197*. 2017 <https://www.researchgate.net/publication/320756041_The_United_States_National_Security_Strategy_under_Bush_and_Obama_Continuity_and_Change>, diakses tanggal 20 Desember 2018.
- Matthews, K 2013. "China and UN Peacekeeping Operations in Africa" dalam *China-Africa Relations p.55*. 2013 <https://www.africaportal.org/documents/10788/China_Africa_book_3.pdf#page=65>, diakses tanggal 27 Maret 2019.

- National Security Strategy Archive, 2010. *National Security Strategy 2010*. 27 Mei 2010 <<http://nssarchive.us/national-security-strategy-2010/>>, diakses tanggal 9 Februari 2019.
- One Hundred Eleventh Congress of the United States of America (Washington, DC: Document certified by Superintendent of Documents pkisupport@gpo.gov 2010), <<http://warondoctors.org/docs4obama/BILLS-111hr3590enr%5B1%5D.pdf> >, diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Petroleum Exploration and Production Department (PEPD), 2014. *Uganda's petroleum resources increase to 6.5 billion barrels oil in place*. 28 August 2014 <www.petroleum.go.ug>, diakses tanggal 2 Februari 2019.
- Ploch, L dan Arieff, A 2012, *The Lord's Resistance Army: The U.S. Response*, CRS Report for Congress, hlm. 4 (file PDF), diunduh dari <<http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42094.pdf> >, diakses tanggal 20 Oktober 2017.
- Resist Africom, n.d. *About Africom*. <http://salsa.democracyinaction.org/o/1552/t/5734/content.jsp?content_KEY=3855>, diakses tanggal 26 Maret 2019.
- Shinn, DH 2009, "China's Engagement in Africa" dalam *Africa Policy Beyond the Bush Years: Critical Challenges for the Obama Administration*, Washington D.C.: Center for Strategic and International Studies.
- Su, A 2016. "China's Business and Politics in South Sudan" dalam *Foreign Affairs*. 6 Juni 2016 <<https://www.foreignaffairs.com/articles/south-sudan/2016-06-06/chinas-business-and-politics-south-sudan>>, diakses tanggal 27 Maret 2019.
- U.S. Africa Command, n.d. *About Africom*. <<http://www.africom.mil/AboutAFRICOM.asp>>, diakses tanggal 26 Maret 2019.
- U.S Department of State, 2010. *Remarks On the Obama Administration's National Security Strategy*. 27 Mei 2010 <<https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2010/05/142312.htm>>, diakses tanggal 20 Januari 2019.
- UN Dispatch, 2010. *Obama's Speech to the UN MDG Summit*. 22 September 2010 <<https://www.undispatch.com/obamas-speech-to-the-un-mdg-summit/>>, diakses tanggal 23 Maret 2019.
- United States Africa Command, 2014. *Uganda Supports US Airlift Missions*. 22 Januari 2014 <<https://www.africom.mil/media-room/article/11674/uganda-supports-us-airlift-missions>>, diakses tanggal 3 Februari 2019.
- Van Acker, F 2004, "Uganda and the Lord's Resistance Army: The new order no one ordered" dalam *African Affairs* 103.412.
- White, L 2010, "What Kind of Change for Africa? U.S Policy in Africa under the Obama Administration" dalam *Paris: Institut des Relations Internationales et Strategiques*.